

MULTI-KOMPETENSI PUSTAKAWAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL

Multi-Competencies of Librarians for Supporting National Development

Endang Fatmawati

Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang 50275
Telp. (024) 76486841, Faks. (024) 76486852
E-mail: endangfatmawati@undip.ac.id

Diajukan: 8 Januari 2018; Diterima: 25 April 2018

ABSTRAK

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan kesiapan semua bidang, termasuk perpustakaan beserta pustakawannya. Pustakawan yang memiliki multi-kompetensi menjadi syarat untuk dapat berperan dalam mendukung pembangunan nasional. Pustakawan dikatakan mempunyai multi-kompetensi jika memiliki kemampuan yang bervariasi, baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sehingga mampu menjalankan tugas kepustakawanan dan tugas lain dengan baik. Selain kompetensi profesional dan kompetensi sosial, multi-kompetensi yang harus dimiliki pustakawan dalam mendukung pembangunan nasional adalah kompetensi hard dan soft, teknologi informasi dan komunikasi, kecerdasan, literasi media, dan literasi informasi.

Kata kunci: Pustakawan, multi-kompetensi, pembangunan nasional, SDGs.

ABSTRACT

Realizing sustainable development goals requires the readiness of all fields, including libraries and librarians. Librarians who have multi-competencies are the conditions to play a role in supporting national development. Librarians are said to have multi-competencies if they have varying abilities, both in the form of knowledge, attitudes, and skills so that they are able to carry out librarian duties and other tasks properly. In addition to professional and social competencies, the multi-competencies that librarians must possess in supporting national development are hard and soft competencies, information technology and communication, intelligence, media literacy, and information literacy.

Keywords: Librarians, multi-competencies, national development, SDGs

PENDAHULUAN

Meski tujuan pembangunan milenium (*Millennium Development Goals, MDGs*) telah berakhir pada 2015, belum ada satu pun negara yang berhasil mencapai seluruh tujuan, sasaran, dan indikator MDGs tersebut. Oleh karena itu, pimpinan negara-negara anggota PBB menyepakati adanya sebuah agenda pembangunan baru yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan kesiapan semua bidang, termasuk perpustakaan. Agar dapat berperan nyata, perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan membutuhkan pustakawan yang kompeten sebagai motor penggerakannya. Apalagi untuk mengakomodasi perubahan perilaku pemustaka yang bervariasi pada era digital seperti sekarang ini. Perubahan tersebut akan berdampak pada cara pandang pustakawan dan parameter kompetensi yang menyertainya. Hanya dengan memiliki multi-kompetensi pustakawan dapat berperan dalam pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan hadirnya tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan agenda baru pembangunan bagi umat manusia, planet bumi, dan kemakmuran.

Pembangunan berkelanjutan memiliki 17 tujuan dan 169 sasaran yang terukur. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi momentum untuk membuka ruang masuknya korporasi melalui kerja sama dengan negara-negara lain dan menjadi alat tagih serta kontrol masyarakat kepada negara. Selain menjaga

keseimbangan dimensi pembangunan berkelanjutan (seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan), dalam tujuan pembangunan tersebut juga terdapat lima area penting yang menjadi perhatian, yaitu umat manusia, bumi, kemakmuran, perdamaian, dan kemitraan. Dengan melaksanakan kelima area tersebut secara menyeluruh, diharapkan akan terjadi perubahan sehingga kehidupan manusia semakin baik dan bumi semakin terjaga. Dalam tataran ini, pustakawan harus siap bergerak mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi yang bervariasi.

Artikel ini disusun untuk memunculkan ide kreatif dan inovatif yang bersifat aplikatif, dengan menawarkan solusi konkret tentang pentingnya multi-kompetensi pustakawan untuk menunjang pembangunan nasional.

MULTI-KOMPETENSI DAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia difokuskan pada aspek mencerdaskan bangsa, kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan berkelanjutan dimulai pada 1 Januari 2016 dan akan berakhir pada Desember 2030 (<http://www.kompasiana.com>). Agenda ini merupakan rencana aksi dunia yang lebih menyeluruh dan disusun melalui proses yang melibatkan sebanyak mungkin pihak untuk memenuhi hak dan mewujudkan kemakmuran manusia maupun kelestarian lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah “*no one left behind*”, yang artinya pelaksanaan pembangunan harus memberi manfaat untuk semua dan melibatkan semua kepentingan.

Pustakawan dapat berperan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Sumekar dan Haryadi (2016) menyebutkan, dalam upaya pengentasan kemiskinan misalnya, pustakawan melalui perpustakaan yang dikelolanya dapat menyediakan akses publik terhadap sumber informasi dan sumber daya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Penyediaan sumber informasi ditujukan baik kepada pemerintah, masyarakat sipil, maupun kalangan bisnis dalam rangka pengambilan kebijakan untuk memerangi kemiskinan.

Dalam Penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada Pasal 11 huruf d dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan standar tenaga perpustakaan juga mencakup kualifikasi

akademis, kompetensi, dan sertifikasi. Dengan demikian, kompetensi menjadi salah satu indikator standar pustakawan di Indonesia. Selanjutnya ketika harus membahas multi-kompetensi, tentu sangat luas cakupannya karena setiap pustakawan di setiap instansi dituntut untuk memiliki kompetensi yang berbeda-beda sesuai dengan ruang lingkup perpustakaan. Suatu contoh pustakawan yang bekerja di perpustakaan perguruan tinggi akan berbeda tuntutan kompetensinya dibandingkan dengan pustakawan yang bekerja di perpustakaan khusus. Perbedaan yang tampak terdapat pada kompetensi khusus sesuai lembaga induknya, walaupun secara umum tetap ada kesamaan kompetensinya.

Multi-kompetensi diperlukan agar pustakawan dapat bekerja secara profesional, berkualitas, dan berkinerja unggul. Pustakawan dengan bermodal multi-kompetensi diharapkan mampu menciptakan *core business* lembaganya. Maksudnya adalah pustakawan mampu menjadi “mitra belajar” bagi pemustaka yang dilayaninya sehingga mampu membimbing dan memandu mereka dalam pencarian informasi yang dibutuhkan. Contoh konkret misalnya pustakawan meningkatkan kompetensi literasi informasi, seperti melakukan orientasi sumber-sumber informasi, sosialisasi antiplagiarisme, maupun mempromosikan perpustakaan melalui *roadshow* dan pameran.

Multi-kompetensi bagi pustakawan sangat penting sebagai bukti atau pengakuan profesionalitas. Uji kompetensi harus dilakukan bagi setiap pustakawan untuk mengukur kompetensi diri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di perpustakaan. Bahkan ada ketentuan jika belum memiliki sertifikat kompetensi, pustakawan yang akan naik jabatan harus lulus uji kompetensi terlebih dahulu. Hal ini tertuang dalam buku Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, Bab X Pasal 33 yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Selain kompetensi personal, pustakawan juga harus mengembangkan kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Kompetensi profesional manakala pustakawan memiliki pengetahuan yang luas terkait sumber daya informasi di perpustakaan kemudian mampu menggunakan pengetahuan yang dimiliki tersebut. Sementara kompetensi personal berarti kemampuan yang melekat pada diri pustakawan yang bersangkutan.

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Perpustakaan, dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilakunya yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Kompetensi pustakawan menurut SKKNI tersebut dikelompokkan menjadi kompetensi umum, kompetensi inti, dan kompetensi khusus.

KARAKTERISTIK MULTI-KOMPETENSI PUSTAKAWAN

Berdasarkan konsep karakteristik kompetensi menurut Spencer (1993), kompetensi terdiri atas pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), hasrat (*motives*), sifat (*traits*), dan konsep diri (*self-concept*). Jika dikaitkan dengan multi-kompetensi pustakawan, karakteristik kompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki pustakawan dalam bidang kepustakawanan. Pengetahuan pustakawan merupakan kompetensi yang kompleks. Pustakawan yang multi-pengetahuan berarti tidak hanya memiliki pengetahuan bidang kepustakawanan, tetapi juga pengetahuan bidang lain. Contohnya, ahli di bidang perpustakaan namun juga ahli merancang pameran.
- b. Keahlian adalah kemampuan pustakawan untuk melaksanakan suatu tugas kepustakawanan, baik secara fisik maupun mental. Pustakawan yang dikaruniai berbagai potensi diri dan talenta akan memiliki multi-keahlian. Misalnya, selain sebagai pustakawan, juga sebagai penulis dan *programmer*.
- c. Hasrat adalah motif diartikan mampu berpikir yang secara konsisten sehingga dapat melakukan tindakan tertentu. Misalnya pustakawan yang memiliki motivasi berprestasi, secara konsisten akan mengembangkan tujuan yang dirasa memberi tantangan pada dirinya, kemudian bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengharapkan umpan balik untuk memperbaiki dirinya.
- d. Sifat adalah watak yang membuat seorang pustakawan berperilaku atau merespons sesuatu dengan cara tertentu. Misalnya saat pustakawan mengerjakan sesuatu namun merasa belum mampu, ia

tetap percaya diri, mampu mengontrol diri, bertanya kepada rekan kerja yang lebih tahu, serta memiliki daya tahan terhadap tekanan organisasi yang mungkin muncul.

- e. Konsep diri adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seorang pustakawan. Dalam hal ini diartikan sebagai cara pandang bagaimana terhadap dirinya sendiri, baik berupa kekuatan maupun kelemahan yang dimilikinya. Termasuk juga karakteristik diri, motivasi diri, pengetahuan yang dimiliki, harapan untuk dirinya, dan penilaian terhadap diri sendiri.

Pustakawan dalam menjalankan profesinya membutuhkan kompetensi lebih dari satu, terlebih dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Payung hukum, peraturan, dan pelaksanaan terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pustakawan beserta kompetensinya diatur dalam Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, serta Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Perpustakaan Tahun 2012.

Perhatian dan apresiasi pemerintah terhadap profesi pustakawan sungguh sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari tunjangan jabatan fungsional pustakawan, sertifikasi profesi, uji kompetensi, penghargaan bagi pustakawan berprestasi, maupun penyediaan payung hukum atau peraturan yang mengatur profesi pustakawan. Singkatnya, pustakawan merupakan profesi mulia dan terhormat di masyarakat dan sangat berperan dalam mendukung pembangunan nasional.

Pustakawan juga termasuk dalam salah satu rumpun di antara jabatan fungsional yang ada di Indonesia. Dalam Peraturan Kepala Perpustakaan RI Nomor 11 Tahun 2015 disebutkan dengan jelas bahwa jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Hal itu semakin memperkuat keberadaan profesi pustakawan yang sangat penting sebagai agen perubahan dan dalam mengemban amanah jabatan fungsionalnya.

UPAYA PENINGKATAN MULTI-KOMPETENSI

Selain memiliki kepakaran dalam bidang perpustakaan, pada era digital saat ini, pustakawan perlu memiliki kompetensi yang berkaitan dengan teknologi informasi maupun kompetensi lain yang mendukung profesi. Era yang semakin kompetitif harus disadari oleh pustakawan dengan senantiasa mengasah, memperbarui, dan meningkatkan multi-kompetensinya.

Banyak cara yang bisa ditempuh agar pustakawan memiliki multi-kompetensi. Dalam konteks ini, sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhan informasi pemustaka yang semakin beragam seiring pesatnya perkembangan TIK, upaya yang bisa ditempuh agar pustakawan memiliki multi-kompetensi antara lain adalah:

1. Menumbuhkan budaya membaca dan menulis agar pengetahuan selalu bertambah dan berkembang;
2. Menempuh studi lanjut disertai dengan surat izin belajar maupun surat tugas belajar;
3. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan kompetisi, misalnya pemilihan pustakawan berprestasi dan lomba penelitian hibah kompetisi;
4. Aktif dalam organisasi profesi pustakawan, misalnya Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (FPKI), Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPPI), Klub Perpustakaan Indonesia (KPI), Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI), Forum Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri (FKP2TN), Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI), Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam (APPTIS), Jaringan Perpustakaan Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (JPAPTIK), Perpustakaan dalam Jaringan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTMA), dan yang lainnya.
5. Rajin mengikuti temu ilmiah kepastakawanan, baik dalam forum tingkat nasional maupun internasional;
6. Mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis untuk keahlian tertentu, misalnya manajemen, TOT, dan pelestarian bahan perpustakaan;
7. Berjejaring untuk meningkatkan kompetensi berorganisasi, misalnya membangun *link* dengan pustakawan dari instansi lain;
8. Membangun *branding* sebagai pustakawan agar sejajar dengan profesi lainnya, misalnya melalui layanan prima yang berorientasi pemustaka;
9. Berkolaborasi untuk berdiskusi dan saling berbagi pengetahuan, misalnya melalui *brainstorming* topik tertentu;
10. Mengikuti pelatihan *soft skill* secara berkala, misalnya komunikasi efektif, negosiasi, dan bahasa Inggris;
11. Bersikap responsif dan kritis terhadap kondisi yang ada, misalnya segera tanggap saat informasi *hoax* marak beredar di masyarakat;
12. Belajar mengelola emosi agar menjadi pustakawan yang memiliki daya juang tinggi, misalnya tidak mudah marah saat tersinggung, atau tidak mudah terbawa perasaan sedih saat ada masalah;
13. *Benchmarking* ke tempat lain, misalnya dengan studi banding ke perpustakaan dalam negeri maupun luar negeri yang pengelolaannya lebih bagus.

Membaca dapat membangun karakter pustakawan, yang dimulai dengan munculnya selera, yang kemudian diikuti timbulnya minat membaca, kebiasaan membaca, dan berujung pada terbangunnya karakter membaca. Di sisi lain, pustakawan boleh berbangga karena tren penurunan buta aksara di Indonesia dari tahun ke tahun terus membaik, misalnya pada tahun 2016 menjadi 3,56% (5,7 juta penduduk). Namun ironis dan mencengangkan jika mencermati minat bacanya. Indonesia berada di posisi 60 dari 61 negara, hanya satu tingkat di atas Botswana. Sementara itu, data dari World's Most Literate Nations tahun 2016 dalam Miller dan McKenna (2016) menempatkan lima negara (Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, dan Swedia) sebagai lima besar dalam keberaksaraan informasi. Dengan demikian, Indonesia masih jauh tertinggal minat bacanya.

Berkaitan dengan karakter, pustakawan yang berkarakter adalah mereka yang mempunyai keyakinan dan sikap. Pembangunan karakter pustakawan merupakan suatu proses panjang yang tidak pernah berakhir (*never ending process*). Pustakawan harusnya juga aktif terlibat dalam kegiatan kerja sama dan jejaring profesional maupun mobilisasi pengetahuan. Semua kegiatan tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi sehingga dapat meningkatkan citra pustakawan.

Pustakawan sebagai unsur SDM di perpustakaan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, multi-kompetensi dibutuhkan untuk membangkitkan dan menguatkan karakter pustakawan agar tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, unggul, dan profesional.

MULTI-KOMPETENSI PUSTAKAWAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Pustakawan merupakan suatu profesi karena memiliki karakteristik, seperti adanya asosiasi pustakawan yang menaunginya, layanan perpustakaan berorientasi pada jasa, maupun memiliki kode etik profesi pustakawan. Selanjutnya jika ditinjau dari pendidikannya, mahasiswa yang kuliah di jurusan ilmu perpustakaan juga memiliki pola pendidikan yang jelas, walaupun saat ini gelar bagi lulusan ilmu perpustakaan masih berbeda-beda.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, pustakawan berbeda dengan pegawai tata usaha karena pustakawan memiliki kemandirian dalam melaksanakan tugasnya. Pustakawan memiliki kewenangan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenjang jabatannya tanpa diintervensi oleh orang lain sehingga apa yang dilakukan bisa diatur sesuai dengan kemampuannya.

Kaitannya dengan pembangunan nasional, pustakawan sebagai profesi mempunyai peluang dan kesempatan yang besar untuk berperan dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Hal ini sebagaimana yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat yang salah satu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara, kaitannya dengan mendukung pembangunan nasional karena ruang lingkup pekerjaan pustakawan adalah mengelola sumber informasi dan lautan pengetahuan yang tentu sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, multi berarti banyak, lebih dari satu; lebih dari dua. Dengan demikian, multi-kompetensi berarti memiliki banyak kompetensi yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Dalam perspektif penulis, multi-kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan dalam mendukung pembangunan nasional adalah sebagai berikut.

Kompetensi *Hard* dan *Soft*

Hard competency terkait dengan kemampuan pustakawan, baik kemampuan fungsional maupun teknis dari pekerjaan yang ditekuni. Contohnya mengolah bahan perpustakaan, katalogisasi, klasifikasi, dan layanan pemustaka. Sementara itu, *soft competency* berkaitan dengan kemampuan pustakawan dalam mengelola proses pekerjaan, hubungan antarmanusia, serta membangun interaksi dengan orang lain. Hal ini terkait dengan

kemampuan lain di luar bidang kepustakawanan, yang dalam realitanya mendukung pekerjaannya sebagai pustakawan. Kemampuan tersebut misalnya hubungan interpersonal dan komunikasi dengan pimpinan, dengan rekan kerja, maupun dengan pemustaka.

Kompetensi di Bidang TIK

Kemampuan di bidang TIK seiring dengan pesatnya kemajuan bidang tersebut sehingga pustakawan harus mampu mengembangkan perpustakaan berbasis digital. Parameter kompetensi dasar TIK ialah dapat menggunakan teknologi komputer untuk mengelola informasi sebagai media transfer pengetahuan kepada masyarakat.

Kompetensi *Quotient*

Kompetensi ini meliputi kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, maupun menghalau tantangan. Kecerdasan intelektual (*IQ*) berarti mengedepankan kemampuan berlogika, seperti menganalisis, memecahkan masalah, dan memahami gagasan. Sementara, kecerdasan spiritual (*SQ*) dibutuhkan agar pustakawan bisa menghayati makna bekerja dan menghayati profesinya sehingga menumbuhkan kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Hal ini akan terefleksi dengan sikap jujur dalam bekerja serta memahami secara mendalam bahwa bekerja merupakan ibadah.

Kecerdasan emosional (*EQ*) berarti memiliki kemampuan untuk bisa menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Hal ini karena pustakawan dalam kesehariannya pasti menemui sesuatu yang menyulut emosi dan memicu konflik sehingga membutuhkan kecerdasan emosional agar segala sesuatu yang muncul dapat dikelola dengan baik. Misalnya, tetap bisa tersenyum kepada pemustaka saat melayani sekalipun pustakawan dalam keadaan marah. Kecerdasan menghalau tantangan dapat diilustrasikan bahwa pustakawan yang tangguh bukanlah yang tidak pernah mendapat masalah. Pustakawan memerlukan kesabaran dan menjadikan masalah yang ada sebagai tantangan agar menjadi lebih baik. Stoltz (2000) menyebut kecerdasan ini dengan istilah *adversity quotient* (*AQ*) yang mendasari semua kesuksesan. Kecerdasan menghalau tantangan merupakan manifestasi dari *IQ*, *SQ*, dan *EQ*.

Kompetensi Menulis

Gemar membaca dan rajin menulis seharusnya sudah membudaya di kalangan pustakawan. Hal ini karena di sekeliling pustakawan terdapat lautan sumber informasi yang sangat berharga. Apalagi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 9 Tahun 2014 Bab VI pasal 15 ayat 1-7 disebutkan bahwa mulai Pustakawan Pertama (pangkat Penata Muda Tk. I Gol. III/b ke atas) yang akan naik pangkat dan jabatan disarutkan memiliki angka kredit yang berasal dari subunsur pengembangan profesi.

Kompetensi Literasi Informasi

Kompetensi di bidang literasi informasi berkaitan dengan kemampuan dalam memberikan edukasi kepada pemustaka sehingga sumbangsuhnya tampak dalam realita. Upaya mengajak pemustaka untuk melek informasi berperan penting dalam membudayakan gemar membaca bagi masyarakat. Pustakawan dapat memberikan penyuluhan dengan topik yang bervariasi dan dilakukan secara berkala, misalnya cara akses *e-resources*, pelatihan Mendeley, dan deteksi plagiasi.

Kompetensi Literasi Media

Munculnya informasi yang beraneka dan tanpa batas saat ini, baik yang berupa *hoax* maupun bukan, sangat membutuhkan kompetensi literasi media bagi pustakawan, baik untuk media tercetak maupun digital. Hal ini sangat penting untuk menghasilkan informasi yang sehat. Dengan memiliki kompetensi literasi media, pustakawan dapat lebih kritis dan selektif terhadap informasi yang muncul. Kompetensi literasi media sangat penting dalam mengakomodasi kebutuhan pemustaka pada era digital saat ini.

KESIMPULAN

Multi-kompetensi menjadi syarat bagi pustakawan untuk berperan dalam pembangunan nasional. Peningkatan kompetensi tidak hanya berhenti pada uji kompetensi

maupun sertifikasi, namun perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Multi-kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan meliputi kompetensi *hard* dan *soft*, penguasaan dalam teknologi informasi dan komunikasi (TIK), memiliki kecerdasan, menulis karya ilmiah, literasi informasi, dan literasi media. Multi-kompetensi senantiasa perlu diperbarui dan ditingkatkan dalam upaya menunjang pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Miller, J.W. and M.C. McKenna. (2016). *World Literacy: How Countries Rank and Why It Matters*. New Britain: Routledge.
- Perpres No. 59/2017 dengan SDG's "Tak Seorang Pun Tertinggal". http://www.kompasiana.com/manuela/perpres-no-592017-dengan-sdgs-tak-seorang-pun-tertinggal_596f25bda5ae781ccf46fde2
- Perpustakaan Nasional RI. (2007). *Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Perpustakaan Nasional RI. (2012). *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 83 tahun 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya Bidang Perpustakaan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Perpustakaan Nasional RI. (2015a). *Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Perpustakaan Nasional RI. (2015b). *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Spencer, N.L. and Spencer, M.S. (1993). *Competence at Work: Models for Superior Performance*. New York: John Wiley & Son Inc.
- Stoltz, P.G. (2000). *Adversity Quotient: Mengubah Hambatan Menjadi Peluang*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sumekar, S. dan Haryadi, U. (2016). *Sosialisasi Sustainable Development Goals (SDGs) Implementasi di Perpustakaan*. <http://ipi.perpusnas.go.id/sites/default/files/berkas/Sosialisasi-sustainable-development-goals-sdgs-Implementasi-di-perpustakaan.pdf> [diakses 17 September 2017].
- <https://kbbi.web.id/multi-> [diakses 17 September 2017].